



Kadin DIY Minta Tunda Kenaikan Pajak Hiburan

YOGYA, TRIBUN - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menunda penerapan kenaikan pajak hiburan.

Terlebih di DIY, ada tiga kabupaten dan kota yang telah mengeluarkan peraturan daerah terkait kenaikan pajak hiburan.

Kabupaten Sleman menaikkan pajak hiburan sebesar 45 persen, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta naik 40 persen.

Wakil Ketua Umum Bidang Perpajakan dan Kepabeanaan Kadin DIY, Deddy Suwadi mengatakan, kenaikan pajak hiburan ini sangat memberatkan pelaku usaha. Terlebih asosiasi dan

pengusaha tidak dilibatkan dalam pembahasan kenaikan pajak hiburan.

"Kami menyatakan dengan tegas dan meminta penundaan kenaikan pajak hiburan. Bukan berarti kami tidak mau bayar pajak. Kami tetap bayar pajak, te-

● ke halaman 11

Kadin DIY

● Sambungan Hal 1

tapi sesuai tarif pajak yang lama. Karena pengusaha sangat keberatan dan juga tidak dilibatkan. Sehingga kami akan berkomunikasi dengan kepala daerah di seluruh DIY dan juga ke Gubernur DIY, agar kebijakan ini ditunda," kata Deddy Suwadi, Rabu (24/1).

Ia menerangkan, kenaikan pajak hiburan sangat berdampak bagi industri pariwisata di DIY. Sebab DIY merupakan daerah tujuan wisata, dimana hiburan adalah penunjang pariwisata.

Saat ini, pelaku usaha baru pulih dari pandemi Covid-19 dan belum stabil. Kenaikan pajak hiburan tentunya akan berdampak pada operasional.

Yang paling dikhawatir-

kan adalah anjloknya kunjungan wisatawan asing akibat kenaikan pajak hiburan.

"Target kunjungan wisatawan asing yang ke Jogja mungkin turun. Karena pembiayaan wisatawan akan meningkat, kemudian berpikir mau ke Jogja kok mahal. Kebijakan ini tidak fair dan berakibat sangat multidimensi," terangnya.

Plh Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies (Asita) DIY, Edwin Edwin Ismedi Himna ikut keberatan dengan kenaikan pajak hiburan. Sebab hampir seluruh wisatawan asing menggunakan jasa hiburan, salah satunya spa.

"Mau dari Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand tetap menggunakan spa. Kami ikut keberatan, apalagi kemudian kalau dibandingkan dengan negara lain, Thailand misalnya, di

sana spanya bagus. Tentu kenaikan pajak hiburan juga akan berdampak pada kunjungan wisatawan," terangnya.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono menilai kebijakan pemerintah ini memberatkan.

"Kebijakan ini memberatkan bagi pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya pada wisatawan. PHRI memang tidak terdampak langsung, tetapi ya tetap akan terdampak juga," ujarnya.

"Dampaknya juga bisa PHK, karena beban pengusaha akan sangat berat. Bukan hanya pajak, tetapi operasional, dan lainnya. Kalau diterapkan ya nggak butuh waktu lama (untuk PHK), bisa hitungan bulan," imbuhnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005